

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sewa

2.1.1 Definisi Sewa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sewa sebagai: (i) pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (ii) uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, ongkos biaya pengangkutan (transpor); (iii) yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Sementara itu, PSAK 30 paragraf 4 menjelaskan sewa sebagai suatu kesepakatan dimana *lessor* menyerahkan kepada *lessee* hak untuk menggunakan aset selama periode waktu yang disepakati dengan imbalan berupa serangkaian pembayaran yang diberikan *lessee* kepada *lessor*. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa sewa terkategori menjadi dua jenis, yaitu *finance lease* dan *operating lease*.

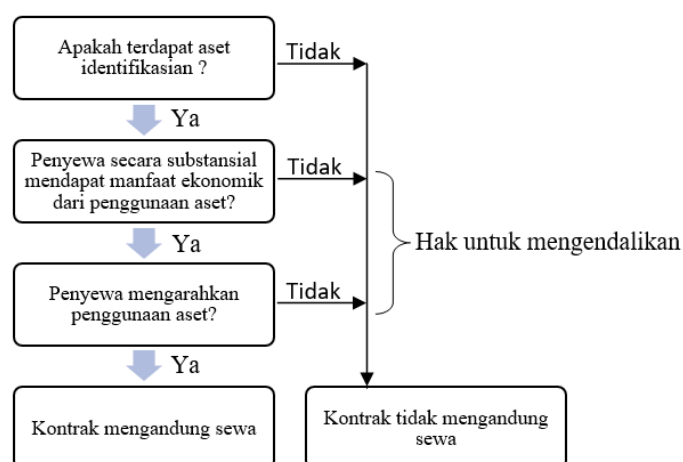
Dalam PSAK 73 sendiri, sewa dapat diidentifikasi dengan meninjau kontrak antara *lessee* dengan *lessor*. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa apabila kontrak tersebut menyerahkan hak untuk mengontrol penggunaan aset identifikasian selama kurun waktu tertentu untuk ditukar dengan imbalan.

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa sewa merupakan hak yang diperoleh oleh *lessee* untuk mengendalikan pemakaian dan pemanfaatan aset yang disewa dari *lessor*. Selanjutnya, ketentuan terkait rentang waktu dan kewajiban untuk memberikan imbalan kepada *lessor* diatur lebih lanjut dalam kontrak antara *lessee* dan *lessor*.

2.1.2 Identifikasi Sewa

PSAK 73 mengartikan suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa apabila di dalam perjanjian tersebut *lessee* diberikan hak oleh *lessor* untuk menguasai dan memanfaatkan pemakaian aset identifikasian selama waktu yang disepakati oleh kedua entitas. Berdasarkan hal tersebut, saat entitas akan melakukan perjanjian sewa, perlu untuk mengidentifikasi apakah kontrak merupakan atau memuat sewa. Gambar II.1 dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu kontrak sewa.

Gambar II.1 Identifikasi Kontrak Sewa



Sumber: Diolah dari PSAK 73

2.2 Akuntansi Sewa bagi *Lessee* dalam PSAK 73

2.2.1 Pengakuan

Berdasarkan paragraf 22 PSAK 73, pada tanggal permulaan, *lessee* mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait kontrak sewa yang terjadi. Aset hak-guna merepresentasikan hak yang dimiliki oleh *lessee* dalam memanfaatkan dan menggunakan aset identifikasian selama kurun waktu yang telah disepakati. Pengakuan ini dikecualikan apabila kontrak yang terjadi memenuhi syarat *operating lease*, yaitu sewa dengan rentang waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan dan sewa dengan *underlying assets* yang bernilai rendah.

2.2.2 Pengukuran

2.2.2.1 Pengukuran Awal Aset Hak-Guna

Mengacu pada paragraf 23 PSAK 73, pada awal kontrak sewa, *lessee* menilai aset hak-guna sesuai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan paragraf 24 PSAK 73 sebagai berikut:

- 1) nilai pengukuran awal liabilitas sewa;
- 2) *lease payment* yang dibayarkan pada atau sebelum tanggal awal, dikurangi dengan *lease incentives* yang diterima;
- 3) *initial direct cost*;
- 4) estimasi biaya yang akan dibayarkan oleh *lessee* untuk mempersiapkan aset pendasar hingga siap digunakan.

2.2.2.2 Pengukuran Awal Liabilitas Sewa

Ketentuan terkait pengukuran awal liabilitas sewa tertera pada paragraf 26 PSAK 73. Pada awal kontrak sewa, *lessee* menilai *lease liability* pada nilai kini *lease payment* yang belum dilunasi pada tanggal tersebut. Selanjutnya, *lease payment* didiskontokan dengan memakai *implicit interest rate* dalam sewa jika *interest rate* tersebut dapat ditentukan. Namun, apabila *interest rate* tidak dapat ditentukan maka *lessee* dapat memanfaatkan *incremental borrowing rate lessee*.

Pada awal kontrak sewa, sebagaimana tertera pada paragraf 27 PSAK 73, *lease payment* yang termasuk dalam pengukuran *lease liability* meliputi pembayaran sebagai berikut:

- 1) *fixed payment* setelah dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- 2) *variable lease payment* yang mengacu pada indeks atau *interest rate* yang telah disepakati saat awal perjanjian sewa;
- 3) *estimated value* yang akan dibayarkan *lessee* dalam jaminan *residual value*;
- 4) biaya eksekusi opsi beli jika *lessee* percaya diri untuk mengeksekusi opsi tersebut;
- 5) *penalty payment* akibat pemberhentian sewa, apabila masa sewa menggambarkan *lessee* mengeksekusi opsi untuk memberhentikan sewa.

2.2.2.3 Pengukuran Selanjutnya Aset Hak-Guna

Pada umumnya, setelah tanggal permulaan, *lessee* dalam menghitung nilai aset hak-guna yang diperolehnya dapat mengaplikasikan model biaya sebagaimana tertera dalam paragraf 29 PSAK 73. Akan tetapi, entitas dapat mengaplikasikan model pengukuran lain sesuai dengan ketentuan pada paragraf 34 dan 35 PSAK 73.

Dalam mengaplikasikan model biaya, *lessee* menghitung aset hak-guna pada biaya perolehan setelah dikurangi dengan *accumulated depreciation* dan akumulasi kerugian penurunan nilai serta penyesuaian dengan melakukan *remeasurement lease liability*. Selanjutnya, terkait depresiasi aset hak-guna, *lessee* menerapkan ketentuan berdasarkan standar akuntansi terkait yang diatur lebih lanjut pada PSAK 16 tentang Aset Tetap. Sementara itu, apabila sewa memindahkan kepemilikan aset pendasar kepada *lessee* pada akhir periode sewa atau apabila biaya perolehan aset-hak guna menggambarkan *lessee* akan mengambil opsi beli maka *lessee* melakukan depresiasi aset hak-guna dari tanggal awal kontrak sewa sampai akhir masa manfaat aset pendasar. Namun, jika sewa tidak memindahkan kepemilikan aset pendasar kepada *lessee* maka *lessee* melakukan depresiasi aset hak-guna dari tanggal awal kontrak sewa sampai tanggal yang lebih awal antara masa manfaat aset hak-guna atau akhir periode sewa.

Dalam model pengukuran lain, sebagaimana tertera pada paragraf 34 PSAK 73, *lessee* dapat menerapkan *fair value model* sesuai dengan ketentuan PSAK 13 tentang Properti Investasi untuk aset terkait. Artinya, *lessee* dapat mengaplikasikan *fair value model* untuk aset hak-guna yang sesuai dengan definisi properti investasi pada PSAK 13 tentang Properti Investasi. Selanjutnya pada paragraf 35 PSAK 73, tertera bahwa aset hak-guna yang termasuk dalam definisi *fixed assets*, *lessee* dapat mengaplikasikan *revaluation model* sesuai dengan PSAK 16 tentang Aset Tetap.

2.2.2.4 Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Sewa

Pengukuran selanjutnya terkait liabilitas sewa sebagaimana disebutkan pada paragraf 36 PSAK 73, tertera bahwa setelah tanggal awal kontrak sewa, *lessee* menghitung *lease liability* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) menaikkan jumlah tercatat untuk menggambarkan bunga atas liabilitas sewa;
- 2) menurunkan jumlah tercatat untuk menggambarkan sewa yang telah dibayar;
- 3) melakukan *remeasurement* terhadap jumlah tercatat untuk menggambarkan *reassessment* atau modifikasi sewa.

Modifikasi sewa akan dicatat oleh *lessee* sebagai sewa terpisah apabila memenuhi ketentuan yang dijelaskan pada paragraf 44 PSAK 73, yaitu:

- 1) modifikasi menaikkan ruang lingkup sewa dengan memperbanyak hak untuk memakai maupun memanfaatkan satu atau lebih aset pendasar;
- 2) imbalan sewa naik senilai jumlah yang sama dengan *standalone price* untuk kenaikan dalam ruang lingkup dan *adjustment* yang sesuai pada *standalone price* tersebut untuk menggambarkan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat oleh *lessee* sebagai sewa terpisah, *lessee* akan mencatat *remeasurement* liabilitas sewa sesuai dengan ketentuan pada paragraf 46 PSAK 73, yaitu:

- 1) mengurangi jumlah tercatat aset hak-guna untuk menggambarkan penghentian parsial atau penuh untuk modifikasi sewa yang mengurangi ruang lingkup sewa;
- 2) membuat *adjustment* terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

2.2.3 Penyajian

Ketentuan mengenai penyajian yang dilakukan oleh *lessee* terkait kontrak sewanya tertera pada paragraf 47 PSAK 73. Entitas menyajikan dalam laporan posisi keuangan atau mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangannya. Ketentuan yang diatur adalah sebagai berikut:

- 1) aset hak-guna disajikan secara terpisah dari aset yang lain. Namun, apabila *lessee* tidak melakukan penyajian terpisah maka *lessee* menyajikan aset hak-guna pada pos yang serupa dengan pos yang dipakai untuk menyajikan aset pendasar apabila aset tersebut dimiliki. Selanjutnya, mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang memuat aset hak-guna tersebut;
- 2) liabilitas sewa disajikan secara terpisah dari liabilitas yang lain. Namun, apabila *lessee* tidak menyajikan *lease liability* secara terpisah maka *lessee* mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang memuat liabilitas tersebut.

2.2.4 Pengungkapan

Pengungkapan bertujuan agar *lessee* dapat mengungkapkan informasi dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi *user* laporan keuangan untuk menilai efek sewa terhadap laporan dan kinerja keuangan *lessee*.

Berdasarkan paragraf 53 PSAK 73, *lessee* mengungkapkan besaran berikut ini dalam laporan keuangannya:

- 1) beban penyusutan aset hak-guna sesuai dengan kelas aset pendasar;

- 2) beban bunga pada liabilitas sewa;
- 3) beban yang berhubungan dengan *short-term lease* yang pencatatannya mengaplikasikan paragraf 6 PSAK 73, beban ini tidak termasuk beban dengan masa sewa kurang atau sama dengan satu bulan;
- 4) beban yang berhubungan dengan sewa aset bernilai rendah dan pencatatannya mengaplikasikan paragraf 6 PSAK 73;
- 5) beban yang berhubungan dengan *variable lease payment* yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa;
- 6) penerimaan yang diterima terkait kegiatan mensubsewakan aset hak guna;
- 7) total pengeluaran kas untuk sewa;
- 8) penambahan aset hak-guna;
- 9) *gain or loss* yang muncul akibat transaksi jual dan sewa balik;
- 10) nilai tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan sesuai dengan kelas aset pendasar.

Dalam pengungkapan poin-poin diatas, *lessee* mengungkapkannya dalam bentuk tabel, kecuali terdapat format yang lebih sesuai. Nilai yang diungkapkan merupakan biaya yang telah *lessee* perhitungkan dalam jumlah tercatat aset lain selama periode pelaporan sebagaimana tertera pada paragraf 54 PSAK 73.

2.3 Akuntansi Sewa bagi *Lessor* dalam PSAK 73

2.3.1 Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan oleh *lessor* untuk masing-masing sewanya baik *finance lease* maupun *operating lease*. Sewa akan digolongkan sebagai *finance lease* apabila terjadi pemindahan secara substansial seluruh *risk and benefit* yang

berhubungan dengan kepemilikan aset pendasar. Sebaliknya, jika tidak terjadi pemindahan secara substansial seluruh *risk and benefit* yang berhubungan dengan kepemilikan aset pendasar maka akan digolongkan sebagai *operating lease*.

2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran *Finance Lease*

2.3.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada awal kontrak sewa, *lessor* mengakui aset yang disewakan dalam *finance lease* pada laporan posisi keuangan. Saldo disajikan sebagai piutang dengan jumlah yang sama dengan *net investment* sesuai dengan ketentuan pada paragraf 67 PSAK 73.

Sesuai dengan penjelasan pada paragraf 68 PSAK 73, *lessor* menggunakan *implicit interest rate* dalam sewa untuk mengukur *net investment*. Selanjutnya, terkait subsewa jika *implicit interest rate* dalam subsewa tidak dapat ditentukan maka dapat memakai tingkat diskonto untuk menghitung *net investment* dalam subsewa. *Direct initial cost*, selain yang muncul dari *lessor* pabrikan atau diler, dimasukkan dalam pengukuran awal *net investment* sewa dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa sebagaimana tertera pada paragraf 69 PSAK 73.

Pengukuran awal *lease payment* termasuk *net investment* sewa dijelaskan lebih lanjut pada paragraf 70 PSAK 73. *Lease payment* yang dihitung dalam penghitungan *net investment* sewa meliputi pembayaran hak untuk memanfaatkan aset pendasar selama periode sewa yang belum diterima pada tanggal awal sebagai berikut:

- 1) *fixed payment* setelah dikurangi dengan insentif sewa terutang;

- 2) *variable lease payment* yang mengacu pada indeks atau *interest rate* pada tanggal awal;
- 3) jaminan nilai residual yang diberikan *lessee* atau pihak yang terkait dengan sewa kepada *lessor*;
- 4) harga eksekusi opsi beli apabila *lessee* percaya diri untuk mengeksekusi opsi tersebut;
- 5) *penalty payment* akibat pemberhentian sewa, apabila sewa tersebut menggambarkan bahwa *lessee* mengeksekusi opsi untuk memberhentikan sewa.

2.3.2.2 Pengukuran Selanjutnya

Paragraf 75-78 PSAK 73 menjabarkan penjelasan terkait pengukuran selanjutnya dari sisi *lessor*. Sebagai pihak yang menyewakan, *lessor* mengakui penghasilan keuangan selama periode sewa, berdasarkan suatu pola yang menggambarkan tingkat imbalan periodik yang tetap atas *net investment* sewa *lessor*.

2.3.2.3 Modifikasi Sewa

Dalam hal *lessor* bertujuan melakukan pencatatan modifikasi atas *finance lease* sebagai sewa terpisah maka poin-poin berikut harus dipenuhi sebagaimana tertera dalam paragraf 79 PSAK 73:

- 1) modifikasi memperbanyak ruang lingkup sewa dengan cara menambahkan hak untuk memanfaatkan satu atau lebih aset pendasar;
- 2) terjadi peningkatan imbalan sewa yang diterima sebesar nilai yang setara dengan *standalone price* untuk peningkatan ruang lingkup sewa dan

adjustment yang sesuai pada *standalone price* dan menggambarkan kondisi kontrak tertentu.

Dalam keadaan *lessor* tidak bertujuan untuk melakukan pencatatan terpisah atas modifikasi *finance lease* maka *lessor* mencatat modifikasi dengan cara berikut sebagaimana tertera dalam paragraf 80 PSAK 73:

- 1) apabila sewa digolongkan sebagai *operating lease* saat modifikasi diterapkan maka *lessor* dapat mencatat modifikasi sewa sebagai sewa baru terhitung mulai tanggal efektif modifikasi dan mengukur nilai tercatat aset pendasar sebagai *net investment* sewa segera sebelum tanggal efektif modifikasi sewa;
- 2) apabila tidak dengan cara pada poin (1) maka *lessor* mengaplikasikan ketentuan yang tertera pada PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan.

2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran *Operating Lease*

2.3.3.1 Pengakuan dan Pengukuran

Paragraf 81-86 PSAK 73 menjabarkan terkait penjelasan pengakuan dan pengukuran *operating lease* dari sisi *lessor*. *Lessor* mengakui *lease payment* dari *operating lease* sebagai penghasilan dengan dasar *straight line* atau dasar sistemik lain. Dalam hal *lessor* mengaplikasikan dasar sistemik lain maka dasar tersebut dinilai lebih menggambarkan pola manfaat dari pemanfaatan aset pendasar yang menurun. Biaya seperti penyusutan atau biaya yang muncul untuk memperoleh penghasilan sewa akan diakui oleh *lessor* sebagai beban. Pesewa pabrikan atau diler tidak mengakui laba penjualan dalam *operating lease* karena dinilai tidak ekuivalen dengan *sales*.

2.3.3.2 Modifikasi Sewa

Pencatatan modifikasi sewa oleh *lessor* diberlakukan sebagai sewa baru per tanggal efektif modifikasi. Hal tersebut didasari atas pertimbangan *lease payment* dibayar di muka terkait sewa *original* sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru.

2.3.4 Penyajian

Dalam melakukan penyajian, *lessor* menyajikan aset pendasar *operating lease* dalam laporan posisi keuangan. Penyajian dikategorikan berdasarkan jenis aset pendasar tersebut sebagaimana tertera dalam paragraf 88 PSAK 73.

2.3.5 Pengungkapan

Pengungkapan bertujuan agar *lessor* dapat mengungkapkan informasi dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi *user* laporan keuangan dalam rangka menilai efek sewa terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas penyewa.

2.3.5.1 Pengungkapan – *Finance Lease*

Pengungkapan untuk *finance lease* dijelaskan dalam paragraf 93 PSAK 73. Penjelasan kualitatif dan kuantitatif terkait perubahan signifikan pada jumlah tercatat *net investment* dalam sewa harus diungkapkan oleh *lessor*. Selanjutnya, *lessor* mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang *lease payment* dengan memperlihatkan *lease payment* yang tidak didiskontokan dan akan diterima secara periodik minimal lima tahun pertama serta nilai total untuk sisa tahun. *Lease Payment* yang tidak didiskontokan tersebut kemudian direkonsiliasi dengan tujuan

untuk mengetahui penghasilan keuangan yang belum diterima dan nilai residual tak terjamin yang didiskontokan.

2.3.5.2 Pengungkapan – *Operating Lease*

Khusus aset tetap yang termasuk dalam *operating lease*, *lessor* mengaplikasikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap. Untuk aset lain yang termasuk dalam *operating lease*, *lessor* mengaplikasikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PSAK 13 tentang Properti Investasi, PSAK 19 tentang Aset Takberwujud, PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset, dan PSAK 69 tentang Agrikultur sesuai dengan kelas aset masing-masing.

Dalam paragraf 97 PSAK 73, dijelaskan lebih lanjut terkait analisis jatuh tempo pembayaran sewa. *Lessor* mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewanya dengan menunjukkan *lease payment* yang tidak didiskontokan dan akan diterima secara periodik minimum lima tahun pertama serta nilai total untuk sisa tahun.

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Definisi Laporan Keuangan

PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menafsirkan laporan keuangan sebagai suatu bentuk penyajian yang terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Palepu dan Healy (2013) dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa, “*Financial statements provide the most widely available data on public corporations’ economic activities, investor and other stakeholders rely on financial reports to assess the plans and performance of firms and corporate managers.*”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk terpadu dan sistematis yang berisi informasi keuangan perusahaan. Informasi tersebut juga menjadi gambaran kinerja keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi.

2.4.2 Jenis Laporan Keuangan

PSAK 1 tentang Standar Akuntansi Keuangan menjabarkan laporan keuangan ke dalam lima jenis laporan, yaitu:

- 1) *income statement* (laporan laba rugi);
- 2) *statement of financial position* (laporan posisi keuangan);
- 3) *statement of changes in equity* (laporan perubahan ekuitas);
- 4) *statement of cash flows* (laporan arus kas);
- 5) *notes to the financial statements* (catatan atas laporan keuangan).

2.5 Analisis Rasio Keuangan

2.5.1 Definisi Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu instrumen analisis laporan keuangan dengan melakukan kalkulasi dan komparasi data kuantitatif yang berasal dari *statement of financial position* dan *income statement*. Palepu dan Healy (2013) dalam bukunya menyatakan, “*Ratio analysis involves an assessment of how various line items in firm’s financial statements relate to one another.*”

Kieso *et al.* (2015) dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat tiga analisis yang dapat digunakan untuk menelaah kinerja laporan keuangan, yaitu analisis likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan menggunakan dua diantaranya, yaitu analisis profitabilitas dan solvabilitas.

Hal ini didasari karena dua analisis rasio tersebut dinilai dapat merefleksikan dampak dari perubahan standar akuntansi keuangan sewa PSAK 30 ke PSAK 73.

2.5.2 Analisis Rasio Profitabilitas

Subramanyam (2014) dalam literturnya menerangkan bahwa analisis profitabilitas merupakan evaluasi atas *return on investment* sebuah perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber dan tingkat profit sebuah perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi profit tersebut. Hasil dari kalkulasi analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai seberapa baik sebuah perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya dan menghasilkan profit dari kegiatan tersebut.

Rasio profitabilitas terbagi menjadi 4 jenis, yaitu *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on equity*, dan *return on assets*. Untuk melihat dampak yang ditimbulkan akibat perubahan standar akuntansi maka penulis akan menggunakan dua diantara empat rasio tersebut, yaitu *return on equity* dan *return on assets*. Hal tersebut disebabkan karena kedua rasio tersebut dinilai dapat menggambarkan perubahan keadaan yang terjadi setelah berubahnya standar akuntansi keuangan terkait sewa.

1. *Return on equity*

Return on equity ratio (ROE) secara umum diartikan sebagai rasio yang menggambarkan kapabilitas perusahaan untuk memperoleh profit dengan *benchmark* modal atau ekuitas perusahaan. Formula rasio ini adalah:

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Net income}}{\text{Common equity}}$$

2. *Return on assets*

Return on assets ratio (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan kapabilitas perusahaan untuk memperoleh profit dengan *benchmark* sumber daya atau total aset perusahaan. Formula rasio ini adalah:

$$\text{Return on assets} = \frac{\text{Net income}}{\text{Total assets}}$$

2.5.3 Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas (*solvency ratio*) atau *leverage ratio* merupakan rasio yang menggambarkan kapabilitas perusahaan dalam merampungkan kewajiban-kewajiban perusahaan dengan jaminan kekayaan atau aset perusahaan. Analisis rasio ini juga dipakai untuk menghitung seberapa jauh aset perusahaan dibiayai oleh *debt*. Terdapat dua jenis rasio solvabilitas, yaitu:

1. *Debt ratio*

Rasio ini berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan persentase total kewajiban perusahaan terhadap total aset perusahaan. Dengan dibandingkannya total kewajiban dan total aset perusahaan maka akan terlihat bagaimana kapasitas perusahaan untuk memperoleh utang baru dengan jaminan aset perusahaan. Formula rasio ini adalah:

$$\text{Debt ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

2. *Debt to equity ratio*

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat utang perusahaan dengan ekuitas perusahaan sebagai *benchmark*. Hal tersebut akan mencerminkan bagaimana besarnya ekuitas perusahaan

bergantung atau tidak terhadap pemberi utang perusahaan. Semakin besar DER dapat menjadi sinyal bahwa sumber keuangan perusahaan sebagian besar dibiayai oleh utang. Formula rasio ini adalah:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}}$$